

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER- /PJ/2022
TENTANG : TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN
KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN
JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

A. Contoh Format Surat Permohonan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

Nomor :(1)
Lampiran :(2)
Hal : Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3)

.....
.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(4)
NPWP/NIK/Paspor :(5)
Alamat :(6)
Telepon :(7)

dalam hal ini sebagai pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.

Dengan ini mengajukan permohonan pembuktian pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya melalui jual beli tanpa hubungan istimewa/jual beli dengan hubungan istimewa/tukar menukar/cara lain**).

Pengalihan sebagaimana dimaksud dilakukan kepada*):

- a. Wajib Pajak atas pengalihan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana;
 b. *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif;
 c. Selain butir a dan b;

dengan keterangan objek pengalihan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apabila di kemudian hari diketahui bahwa ternyata data-data yang disampaikan tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka kami siap menerima segala konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan.

.....,20.....(8)

Tanda Tangan (9)

.....(4)

*) diisi dengan checklist (√)

**) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi dengan nomor surat permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
- (2) Diisi dengan jumlah lampiran.
- (3) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- (4) Diisi dengan nama pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
- (5) Diisi dengan NPWP/NIK/Nomor Paspor pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
- (6) Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
- (7) Diisi dengan nomor telepon pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
- (8) Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- (9) Diisi dengan tanda tangan pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.

B. Daftar Pembayaran Pajak Penghasilan (untuk 1 Objek Pengalihan)

Identitas Objek Pengalihan

- NOP : (1)
- Alamat Objek : (2)
- Luas Tanah : (3)
- Luas Bangunan : (4)
- Nilai Pengalihan : (5)
- Cara Pembayaran : (6)
- Nomor Rekening : (7)
- Nama Bank : (8)
- Nama Pemilik Rekening : (9)

Identitas Pembeli

- Nama : (10)
- NPWP/NIK/No.Paspor : (11)
- Alamat : (12)

Informasi Notaris/PPAT

- Nama : (13)
- NPWP : (14)
- No. Register : (15)

No	Informasi Transaksi Pengalihan				Bukti Pembayaran PPh		
	Termin	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	PPh Terutang	KAP	KJS	NTPN/Pbk
	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1							
2							
dst							

Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi dengan Nomor Objek Pajak
- (2) Diisi dengan alamat objek pengalihan
- (3) Diisi dengan luas tanah
- (4) Diisi dengan luas bangunan
- (5) Diisi dengan nilai pengalihan
- (6) Diisi dengan cara pembayaran "transfer/tunai/transfer & tunai/cara lain".
- (7) Diisi dengan nomor rekening dalam hal cara pembayaran transfer.
- (8) Diisi dengan nama bank dalam hal cara pembayaran transfer.
- (9) Diisi dengan nama pemilik rekening dalam hal cara pembayaran transfer
- (10) Diisi dengan nama pembeli
- (11) Diisi dengan NPWP/NIK/Nomor paspor pembeli.
- (12) Diisi dengan alamat pembeli.
- (13) Diisi dengan nama Notaris/PPAT.
- (14) Diisi dengan NPWP Notaris/PPAT.
- (15) Diisi dengan Nomor Register Notaris/PPAT.
- (16) Diisi dengan termin pembayaran Pajak Penghasilan (dalam hal pembayaran lebih dari 1 kali). Sebagai contoh pembayaran termin ke-2 (kedua) ditulis "2".
- (17) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran per termin.
- (18) Diisi dengan jumlah pembayaran per termin atas transaksi pengalihan.
- (19) Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan terutang.
- (20) Diisi dengan Kode Akun Pajak.
- (21) Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
- (22) Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)/Nomor Bukti Pindahbukuan (Pbk).

Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- (2) Diisi dengan alamat objek pengalihan (termasuk nama perumahan/apartemen/cluster/tower/blok/nomor Unit).
- (3) Diisi dengan luas tanah.
- (4) Diisi dengan luas bangunan.
- (5) Diisi dengan nama pembeli.
- (6) Diisi dengan NPWP atau NIK atau Nomor Paspor pembeli (pilih salah satu).
- (7) Diisi dengan alamat pembeli.
- (8) Diisi dengan nilai Pengalihan.
- (9) Diisi dengan termin pembayaran Pajak Penghasilan. Sebagai contoh pembayaran termin ke-2 (kedua) ditulis "2".
- (10) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran per termin.
- (11) Diisi dengan jumlah pembayaran per termin atas transaksi pengalihan.
- (12) Diisi dengan cara pembayaran "transfer/tunai/transfer & tunai/cara lain"
- (13) Diisi dengan nomor rekening dalam hal cara pembayaran transfer.
- (14) Diisi dengan nama bank dalam hal cara pembayaran transfer.
- (15) Diisi dengan nama pemilik rekening dalam hal cara pembayaran transfer.
- (16) Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan terutang.
- (17) Diisi dengan Kode Akun Pajak.
- (18) Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
- (19) Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)/Nomor Bukti Pemindahbukuan (Pbk).
- (20) Diisi dengan nama Notaris/PPAT
- (21) Diisi dengan NPWP Notaris/PPAT.
- (22) Diisi dengan nomor register Notaris/PPAT.

D. Contoh Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : (1)
NIK/No Paspor : (2)
Status : Kawin/Tidak Kawin*
Jumlah Tanggungan : (3)
Alamat : (4)
Telepon : (5)

telah menyetorkan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya* tanpa menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak, karena:

selama tahun (6) memiliki penghasilan sebesar Rp(7).**

merupakan Subjek Pajak Luar Negeri. **

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..... (8)
Yang membuat pernyataan

Meterai

 (9)

(.....) (1)

Keterangan

* coret yang tidak perlu

** pilih salah satu

Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi dengan nama yang membuat pernyataan.
- (2) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Paspor yang membuat pernyataan.
- (3) Diisi dengan jumlah tanggungan, yaitu setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (4) Diisi dengan alamat yang membuat pernyataan.
- (5) Diisi dengan nomor telepon yang membuat pernyataan.
- (6) Diisi dengan tahun terakhir sebelum tahun permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
- (7) Diisi dengan jumlah penghasilan dalam satu tahun selama tahun terakhir sebelum tahun permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
- (8) Diisi dengan tanggal surat pernyataan.
- (9) Diisi dengan tanda tangan yang membuat pernyataan.

E. Contoh Format Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK</p>
<p>SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN Nomor : (1)</p>	
<p>TELAH DITELITI</p> <p>A. Identitas Orang Pribadi atau Badan Nama Orang Pribadi/Badan : (2) NPWP : (3) Alamat : (4)</p> <p>B. Identitas Objek Pajak Nomor Objek Pajak : (5) Alamat : (6) Luas Tanah/Bangunan : LT : (7) / LB : (8)</p> <p>C. Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh Kode Akun Pajak : (9) Kode Jenis Setoran : (10) Jumlah Pembayaran : (11) Jumlah Bukti Pembayaran : (12)</p>	
<p>(Kode Verifikasi) (13)</p> <div style="text-align: center;">  (14) </div>	
<p>Pelayanan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Tidak Dipungut Biaya</p>	
<p><i>Dalam hal terdapat data yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang dibayar, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menagih kekurangannya.</i></p>	

Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi dengan nomor Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan.
- (2) Diisi dengan nama pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Diisi dengan NPWP pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (4) Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (5) Diisi Nomor Objek Pajak yang dialihkan.
- (6) Diisi dengan alamat objek pengalihan (termasuk Nama Perumahan/Apartemen/Cluster/Tower/Blok/Nomor Unit)
- (7) Diisi luas tanah objek yang dialihkan
- (8) Diisi luas bangunan objek yang dialihkan.
- (9) Diisi dengan Kode Akun Pajak.
- (10) Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
- (11) Diisi dengan jumlah pajak yang dibayarkan.
- (12) Diisi dengan jumlah bukti pembayaran.
- (13) Diisi dengan kode verifikasi.
- (14) *Quick Response Code.*

F. Contoh Format Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP(1)
 KANTOR PELAYANAN PAJAK(2)

**SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENELITIAN FORMAL
 TIDAK LENGKAP DAN/ATAU TIDAK SESUAI**

Nomor : (3)
 Lampiran : (4)
 Hal : Surat Pemberitahuan Formulir Penelitian Formal Bukti
 Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan
 Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai

Yth. (5)
 NPWP
 di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (6) Tanggal (7) hal (8), dengan ini disampaikan bahwa permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya yang Saudara sampaikan, tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut karena masih terdapat kelengkapan dokumen yang tidak dilampirkan dan/atau data yang tidak sesuai, dengan rincian sebagai berikut:

a. kelengkapan dokumen persyaratan

No	Uraian Kelengkapan Dokumen	Keterangan (9)	
		Ada	Tidak Ada
1.	Daftar bukti pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan		
2.	Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa dalam hal permohonan dikuasakan (opsional)		
3.	Surat Pernyataan tidak wajib menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (opsional)		
4.	fotokopi pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh OJK (opsional)		
5.	keterangan dari OJK bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan <i>Special Purpose Company</i> atau KIK dalam skema KIK tertentu (opsional)		
6.	surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa orang pribadi atau badan melakukan pengalihan Real Estat kepada <i>Special Purpose Company</i> atau KIK dalam skema KIK tertentu (opsional)		

b. kesesuaian data penelitian formal

No	Uraian Kesesuaian Data	Keterangan (10)	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	identitas orang pribadi atau badan dalam bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan dengan data di Direktorat Jenderal Pajak dan/atau fotokopi KTP atau Paspor		
2	jumlah Pajak Penghasilan yang telah disetor oleh orang pribadi atau badan dengan Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang berdasarkan surat permohonan		
3	kode akun pajak, kode jenis setoran dan jumlah Pajak Penghasilan yang disetor oleh orang pribadi atau badan, dengan data penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara		

Apabila Saudara telah melengkapi dokumen dan/atau menyesuaikan data tersebut, Saudara dapat mengajukan kembali permohonan penelitian tersebut.

Demikian disampaikan.



Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.
 - (2) Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
 - (3) Diisi dengan nomor surat.
 - (4) Diisi dengan lampiran surat.
 - (5) Diisi dengan nama dan alamat orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan penelitian formal.
 - (6) Diisi dengan nomor surat permohonan penelitian formal orang pribadi atau badan.
 - (7) Diisi dengan tanggal surat permohonan penelitian formal orang pribadi atau badan.
 - (8) Diisi dengan perihal surat permohonan penelitian formal orang pribadi atau badan.
 - (9) Diisi dengan checklist (√) keterangan kelengkapan dokumen.
 - (10) Diisi dengan checklist (√) keterangan kesesuaian data.
 - (11) Diisi dengan *Quick Response Code*
-

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM

DWI BUDI ISWAHYU
NIP 197011021990121001